

DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP EKSISTENSI NILAI BUDAYA BASANOHI PADA DESA WAIBOGA KECAMATAN SULABESSI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

Andiyana Sadipun¹, Louisa M Metekohy², Remon Bakker³

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: andiyanasadipun6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dampak pemilihan kepala desa terhadap eksistensi nilai budaya basanohi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga berdampak pada eksistensi nilai budaya basanohi, dan faktor penghambat dan penunjang yang diwujudkan dalam pemilihan kepala desa yang berdampak pada eksistensi nilai budaya basanohi, serta bagaimana upaya dan usaha yang dilakukan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mempertahankan eksistensi budaya basanohi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa membawa dampak cukup besar terhadap budaya basanohi masyarakat desa waiboga, dan sangat merugikan masyarakat, karena perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala desa masi menjadi alasan hilangnya persatuan, kesatuan dan kebersamaan masyarakat desa, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menyadari pentingnya budaya basanohi dalam kehidupan masyarakat desa waiboga. Selain itu upaya dan usaha yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mempertahankan eksistensi budaya basanohi terhadap masyarakat desa waiboga masi di perlukan agar pada pemilihan kepala desa kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang muncul akibat dampak dari pemilihan kepala desa di desa waiboga.

Kata Kunci: Dampak pemilihan, Kepala desa, Basanohi.

Abstract

This study aims to describe how the impact of village head elections on the existence of basanohi cultural values. This study uses descriptive qualitative research which aims to find out how the reality of the implementation of the village head election has an impact on the existence of the Basanohi cultural values, and the inhibiting and supporting factors embodied in the village head election that has an impact on the existence of the Basanohi cultural values, as well as how the efforts and efforts made carried out by traditional leaders and community leaders in maintaining the existence of the Basanohi culture. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of the village head election has a considerable impact on the Basanohi culture of the Waiboga village community, and is very detrimental to the community, because the difference in choice in the election of village heads is still the reason for the loss of unity, unity and togetherness of the village community, this shows that the community has not realize the importance of the Basanohi culture in the life of the Waiboga village community. In addition, the efforts and efforts made by community leaders and traditional leaders in maintaining the existence of the Basanohi culture against the Waiboga masi village community in is necessary that in the future village head elections there will be no more problems that arise as a result of the impact of the village head election in the village of waiboga.

Keywords: Impact of election, village head, Basanohi.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu), mulai dari pemerintahan yang paling bawah di daerah sampai pada pemerintahan pusat. Karena sebagai ciri negara demokrasi Indonesia tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dara indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, prtsatuan indonesia, dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”

Pada hakikatnya, proses demokrasi adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh warga negara dalam mengambil keputusan pada partisipasi politik melalui proses pemilihan umum untuk menuju pada harapan dan cita-cita bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Sekaitan dengan hal tersebut, maka menurut Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, (2008) bahwa: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oleh karena itu, Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia saat ini, baik yang dilaksanakan secara nasional maupun di daerah merupakan bukti nyata eksistensi demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. dengan tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislatif yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (*policy*). Keterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasan kita dalam berdemokrasi.

Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemilihan umum yang professional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum,

sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal di Indonesia”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerinrah desa dalam dilaksanakan pemerintahannya harus menghargai, menghormati, dan melindungi berbagai pola pikir, kepercayaan, dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda di dalam keberadaan kehidupan masyarakat yang melahirkan suatu tatanan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah Budaya Basanohi di desa Waiboga kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara sebagai suatu tatanan dalam pranata sosial yang memperlihatkan keberadaan masyarakat di desa Waiboga tanpa memandang atau mempertimbangkan perbedaan yang ada didalam kehidupan antara masyarakat desa, dalam artian bahwa setiap masyarakat yang di ada di desa waiboga semuanya bersaudara dan memiliki hak untuk hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

Budaya *Basanohi* memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat disebabkan adanya budaya ini dapat memperkuat tali silaturahmi antar masyarakat, sehingga budaya *basanohi* ini merupakan tatanan nilai budaya yang lahir dari ikatan keluarga dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat sampai sekarang ini. Budaya ini merupakan bagian dari warisan leluhur yang bertujuan bagi masyarakat untuk saling bersatu dalam bingkai persaudaraan, tanpa memandang perbedaan. Kendatipun, Budaya *Basanohi* ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat desa Waiboga, yang memperlihatkan tatanan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan antar warga, persaudaraan, dan solidaritas yang tinggi yang dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Pada kenyataannya dengan digulirnya pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya pemilihan kepala desa di Waiboga sebagai amanat dan salah satu agenda reformasi di Indonesia, yang diharapkan dapat membantu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan menghadirkan semangat otonomi daerah, agar daerah dapat mengurus dirinya sendiri dengan diadakannya pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa sebagai salah satu tatanan demokrasi dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, khususnya yang dilaksanakan di desa Waiboga. Akan tetapi pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat merusak tatanan nilai budaya *Basanohi* di desa Waiboga Maluku Utara. Sebab pelaksanaan pemilihan umum kepala desa memiliki tantangan tersendiri bagi masyarakat yang selalu dan senantiasa mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada dan hidup didalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif, Arikunto.S (2008 : 149), yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat tentang fakta-fakta dilapangan yang berhubungan dengan hal-hal dilapangan.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dari *Miles* dan *Huberman* ini memiliki empat tahapan, yaitu pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Analisis data dengan model interaksi dari *Miles* dan *Huberman* dapat digambarkan sebagai berikut (*Miles & Sugiyono,2005;102*), bahwasanya pengumpulan data: merupakan data yang di dapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan. Reduksi data: selanjutnya sesudah data di kumpulkan dibuat reduksi data untuk menentukan data yang

relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian Data: bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel, dan grafik. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Penarikan Kesimpulan: penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagaimanakah realitas pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga berdampak pada eksistensi Nilai Budaya Basanohi ?

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan calon yang berhak dipilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Dinda Alina, (2020) bahwa:

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan proses pilkades yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Dikarenakan Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Dinda Alfina, 2020).

Dampak secara sederhana bisa di artikan sebagai pengaruh atau akibat, dampak juga memiliki dua pengertian yaitu dampak positif dan negative. Dalam hal ini yang akan di bahas adalah terkait dengan dampak negative dalam pemilihan kepala desa di desa waiboga yang juga cukup membawa pengaruh terhadap kehidupan serta kebersamaan dalam masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Waiboga, memang memiliki dampak yang besar dan sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan proses memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala desa menjadi alasan timbulnya keretakan dalam hubungan masyarakat, sehingga kecenderungan rusak dan lunturnya nilai-nilai budaya menjadi sasaran utama dalam pemilihan kepala desa, selain itu hubungan antar keluarga maupun antar masyarakat yang tadinya rukun dan saling bekerjasama dalam setiap aspek sosial kini hilang dan berakhir dengan saling bermusuhan hanya karena berbeda pilihan dalam pemilihan kepala desa.

Lebih dari itu, dengan perbedaan pandangan dalam pemilihan kepala desa, juga akan menimbulkan perselisihan baik dalam hubungan keluarga maupun antar masyarakat, sehingga nilai budaya *Basanohi* yang awalnya dijadikan sebagai panutan nilai persaudaraan, kerukunan, dan solidaritas masyarakat, kini luntur dan tergeser dengan hadirnya permusuhan dan perselisihan diantara warga masyarakat di desa Waiboga Terkait dengan hal tersebut, maka Saleh (2004:22) mengemukakan bahwa; "Seiring dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Indonesia, tidak jarang menuai kericuhan, konflik, bahkan disintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga nilai-nilai sosial budaya yang telah

tertanam dalam kehidupan masyarakat, akan semakin tergeser akibat kepentingan politik yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi nilai budaya dalam masyarakat”.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat di simpulkan bahwa dampak dari pemilihan kepala desa di desa waiboga cukup membawah pengaruh terhadap budaya basanohi (persaudaraan) masyarakat desa. melihat bahwa perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala desa masi menjadi tolak ukur hilangnya kebersamaan dan persatuan serta hubungan baik dalam masyarakat. Seharusnya masyarakat desa dapat menyadari bahwa pemilihan kepala desa ini hanya sebagai suatu aturan untuk mendapatkan pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di desa. sehingga permasalahan yang timbul akibat dampak dari pemilihan kepala desa ini tidak mengakibatkan budaya basanohi (persaudaraan) masyarakat desa menjadi renggang. Dlam hal ini peran tokoh masyarakat dan tokoh adat juga sangat penting untuk bagaimana merangkul dan meberikan pemahaman kepada masyarakat dan para generasi muda dalam menjelang pemilihan kepala desa.

Bapak Sahdan, 2022 selaku ketua pemilihan mengatakan bahwa, pelaksanaan pemilhan kepala desa yang terjadi di desa waiboga sangat berdampak pada budaya basanohi (persaudaraan) karna sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa budaya basanohi atau hubungan persaudaraan antar masyarakat yang ada di desa waiboga itu sangat baik akan tetapi pada saat momen pemilihan perbedaan kepentingan dan perbedaan pilihan dapat mempengaruhi budaya basanohi sehingga budaya basanohi atau persaudaraan yang awalnya harmonis dapat berahir dengan konflik dan saling bermusuhan baik itu sesama keluarga ataupun sesama masyarakat.

Pembahasan

Faktor penghambat dan penunjang apa sajakah yang diwujudkan dalam pemilihan kepala desa sehingga berdampak pada eksistensi Budaya Basanohi ?

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidakhanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Menurut teori klasik Aristoteles, bahwa: “Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Perspektif lain mengatakan bahwa politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, atau sesuatu yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. (Widodo, 2018; 70-78)”

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hubungan masyarakat dengan proses politik selalu mengarah pada proses partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pada faktor penghambat dan penunjang yang di wujudkan dalam pemilihan kepala desa sehingga berdampak pada budaya basanohi dapat di simpulkan bahwa masyarakat tidak merasakan adanya faktor penunjang dalam pemilihan kepala desa akan tetapi dalam hal ini terdapat faktor penghambat yang mana berkaitan dengan masyarakat desa yang masi mengedepankan kepentingan pribadi kelompok dalam pemilihan, sehingga hal seperti ini dapat menimbulkan konflik serta perselisihan dalam masyarakat.dari permasalahan yang telah di paparkan di atas dapat di ketahui bahwa adanya Faktor penghambat seperti yang di jelaskan sebelumnya dalam pemilihan kepala desa dapat berdampak pada budaya persaudaraan masyarakat desa waiboga. hal ini memerlukan kesadaran dari setiap masyarakat agar memahami bahwa pemilihan kepala desa hanya sebagai aturan dalam berdemokrasi tanpa melibatkan kepentingan setiap kelompok agar budaya basanohi tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat desa.

“Bapak Salim, 2022 selaku tokoh Masyarakat mengatakan bahwa, faktor penghambat dalam pemilihan kepala desa adalah faktor kepentingan dimana dengan adanya kepentingan apalagi dalam kondisi masyarakat yang membentuk kelompok kecil dalam lingkungan masyarakat desa, membuat mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok”.

Dari penjelasan di atas dapat di disimpulkan bahwa tidak ada faktor penunjang dalam pemilihan kepala desa akan tetapi untuk faktor yang menjadi penghambat dalam pemilihan kepala desa sehingga berdampak pada budaya adalah faktor kepentingan melihat bahwa masyarakat yang hidup dengan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam kehidupan sosial, dapat mempengaruhi budaya persaudaraan masyarakat desa sehingga dapat mengakibatkan hilangnya persatuan, kebersamaan, serta hubungan baik dalam masyarakat.

Bagaimanakah Upaya dan Usaha yang dilakukan tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam mempertahankan eksistensi budaya Basanohi ?

Hadirnya pemerintahan daerah merupakan buah pemikiran dari pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena memandang Negara Indonesia yang sangat luas dan terpisahkan oleh beribu-ribu pulau, sehingga tentunya sulit bagi pemerintah untuk menjangkau setiap daerah hingga ke pelosok negeri. Maka dari itu,melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya. desa adalah satuan pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, urusan kewenangan yang dimiliki oleh desa berupa hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. (Simangunsong & Rasak, 2016 67:84)

Selanjutnya, upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistempemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, sertakedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika- dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan tidak akan tercipta tanpa ada manusia yang mau melestarikannya karena manusia tersebut adalah bagian dari masyarakat yang membentuk kebudayaan. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup

bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola- pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antarkelompok. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Panjaitan & Sundawa, (2016; 64) bahwa: Budaya atau yang dikenal dengan kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata buddhayah. Kata buddhayah adalah bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti sebagai hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, kata culture sendiri berasal dari kata Latin colere yang berarti pemeliharaan, pengelolaan, dan penggarapan tanah menjadi tanah pertanian. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah dampak pemilihan kepala desa terhadap budaya basanohi(persaudaraan), terlihat bahwa peran dari tokoh-tokoh penting dalam masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat sangatlah penting untuk ketertiban dan keamanan masyarakat desa. Mengingat bahwa tokoh masyarakat memiliki peran sangat penting sebagai pengendali sosial dalam msyarakat, tidak berbeda dengan tokoh masyarakat tokoh adat juga memiliki peran untuk menjaga dan memelihara agar tradisi –tradisi serta budaya yang ada di masyarakat tetap ada. seperti pada desa waiboga terlihat dimana dampak dari pemilihan kepa desa ini menjadi salah satu penyebab hilangnya budaya basanohi dalam masyarakat, kehidupan masyarakat yang awalnya akur dan saling bekerja sama dalam segala aspek perlahan akan hilang di sebabkan karna perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala desa yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan sosial masyarakat desa. Keadaan seperti ini menjadi suda menjadi tugas para tokoh untuk begaimana merangkul dan memberikan pemahaman terkait pemilihan kepala desa kepada para masyarakat dan generasi muda menjelang pemilihan, agar kedepannya pemilihan kepala desa suda tidak lagi menjadi alasan hilannnya kebersamaan dalam masyarakat agar hubungan dan nilai-nilai baik yang hadir dari budaya basanohi tetap terjaga dan terikat dengan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, berikut ini dikemukakan kesimpulan yaitu: Dampak pemilihannya kepala desa terhadap eksistensi nilai budaya basanohi memberikan dampak yang cukup besar terhadap tatanan nilai persatuan dan kesatuan masyarakat di desa waiboga. hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan kepala desa dimana masyarakat mebentuk kelompok-kelompok kecil dengan perbedaan pilihan yang memicu timbul konflik antar masyarakat desa, seharusnya masyarakat dapat menyadari bahwa perbedaan pilihan dalam pemilihan kepala desa itu merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak menjadi tolak ukur masyarakat untuk saling bermusuhan. Pentingnya pemilihan kepala desa dalam suatu desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, karna pada hakekatnya Negara ini adalah Negara yang menganut sistem demokrasi sehingga suda menjadi hal yang wajar jika pemilihan kepala desa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan pemimpin yang akan membahwa pemerintahan di desa kearah yang lebih baik lagi.

Dalam pemilihan kepala desa tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan penunjang akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, masyarakat tidak merasakan adanya faktor penunjang dalam pemilihan kepala desa, namun dalam masalah ini yang menjadi faktor penghambat berkaitan dengan masyarakat desa yang masi mengedepankan kepentingan pribadi kelompok di atas kepentingan bersama dalam pemilihan, sehingga hal seperti ini dapat menimbulkan konflik serta perselisihan dalam

masyarakat. Oleh karena itu Berkaitan dengan dampak yang timbul akibat dari pemilihan kepala desa sehingga berdampak pada eksistensi nilai budaya basanohi, harus adanya upaya dan usaha yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di desa, untuk bagaimana dapat merangkul masyarakat dan para generasi muda untuk memberikan pemahaman mengenai dampak yang timbul akibat dari pemilihan terhadap budaya persaudaraan, agar nanti pada saat menjelang ataupun sesudah pemilihan hasil yang di dapatkan tidak mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan perselisihan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini melalui media tulisan penulis menghanturkan terima kasih dan bangga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendorong dan juga memotivasi pada pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada: Dr. Louisa. M. Metekohy S.H.M.Pd. sebagai pembimbing I dan Remon Bakker. S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing serta membekali, memberi arahan dengan penuh kasih dan memotivasi serta selalu mendoakan penulis dalam setiap proses pembimbingan berlangsung hingga selesai dalam penelitian ini. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mengajar, membimbing, membina serta mendidik penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan baik di dalam maupun di luar ruangan selama proses perkuliahan. Untuk kedua orang tuaku yang tidak pernah putus berdoa, dan selalu memberikan semangat dan dorongan setiap saat kepada saya sehingga berada di titik ini. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini.

DAFTAR PUSTAKA

- David Bentham dan Kevin Boyle, (2000). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. Termuat dalam [Online] <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1190/1251>
- Dinda Alfina. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(9), 1689–1699.
- Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, (2008): Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. Termuat dalam [Online]. (<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-indonesia>) diakses pada tanggal 12 Desember 2021 jam 15.00 WIT, [Tersedia].
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272. Tersedia [Online]: (<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>), diakses pada tanggal, 12 November 2021.
- Saleh, (2004). *Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.
- Simangunsong, F., & Rasak, T. A. (2016). Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 67–84.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Bandung: Citra Umbara

Widodo, B. (2018). Membangun Kedewasaan Berpolitik Warga Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 70–78. <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n1.2018.pp70-78>